

## Dampak Perlambatan Ekonomi Nasional terhadap Kepatuhan Pebayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan

Karmila<sup>a</sup>, Abustan Nur<sup>b</sup>, Afdinda Rahmi<sup>c</sup>, Nuril Fauzah<sup>d</sup>

<sup>a,b,c,d</sup> Universitas Sains Islam AL Mawaddah Warrahmah Kolaka  
email: [mhilaila584@gmail.com](mailto:mhilaila584@gmail.com)\*

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received : 22 Desember 2025

Revised : 13 Januari 2026

Accepted : 25 Januari 2026

#### Keywords:

National economic slowdown;  
Contribution payment  
compliance; BPJS Health;  
Independent participants;  
National Health Insurance  
(JKN); Literature review

#### Kata Kunci:

Perlambatan ekonomi nasional;  
Kepatuhan pembayaran iuran;  
BPJS Kesehatan; Peserta  
mandiri; Jaminan Kesehatan  
Nasional; Literature review.

DOI: 10.62335

### ABSTRACT

*The slowdown of the national economic condition is one of the factors affecting the sustainability of the National Health Insurance (JKN) program, particularly regarding the compliance of independent participants in paying BPJS Health contributions. Economic instability, characterized by declining income, increasing cost of living, and household financial pressure, can impact participants' ability and willingness to meet contribution obligations regularly. This study aims to examine the effect of economic slowdown on the compliance of BPJS Health contributions among independent participants using a literature review approach. The method employed is a literature review by analyzing various national scientific articles published within the last five years (2020–2024) and obtained from accredited journals and online scientific repositories. The findings indicate that economic aspects, such as income level, ability to pay, and willingness to pay, play a significant role in the level of contribution compliance. In addition to economic factors, participants' understanding of JKN benefits, perception of healthcare service quality, as well as contribution policies and the implementation of sanctions also influence compliance. Economic slowdown tends to reduce contribution compliance, especially among low-income participants and informal sector workers. Therefore, strategic efforts by the government and BPJS Health are necessary through more adaptive policies, targeted subsidies, enhanced participant education, and the development of flexible contribution schemes to maintain the sustainability of the JKN program amid national economic dynamics.*

### ABSTRAK

Perlambatan kondisi ekonomi nasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya terkait kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Ketidakstabilan ekonomi yang ditandai dengan penurunan pendapatan, meningkatnya kebutuhan hidup, serta tekanan

finansial rumah tangga dapat berdampak pada kemampuan dan kemauan peserta untuk memenuhi kewajiban iuran secara rutin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perlambatan ekonomi terhadap kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan peserta mandiri melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah nasional yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) dan diperoleh dari jurnal terakreditasi serta repositori ilmiah daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek ekonomi, seperti tingkat pendapatan, kemampuan membayar (*ability to pay*), dan kemauan membayar (*willingness to pay*), berperan penting terhadap tingkat kepatuhan pembayaran iuran. Selain faktor ekonomi, pemahaman peserta mengenai manfaat JKN, persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan, serta kebijakan iuran dan penerapan sanksi juga turut memengaruhi kepatuhan. Kondisi perlambatan ekonomi cenderung menurunkan kepatuhan pembayaran iuran, terutama pada peserta dengan pendapatan rendah dan pekerja sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah dan BPJS Kesehatan melalui kebijakan yang lebih adaptif, pemberian subsidi yang tepat sasaran, peningkatan edukasi peserta, serta pengembangan skema iuran yang fleksibel guna menjaga keberlanjutan Program JKN di tengah dinamika ekonomi nasional.

## LATAR BELAKANG

Perlambatan ekonomi nasional merupakan isu makroekonomi yang memberikan dampak multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor kesehatan. Kondisi ini ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tingkat pengangguran, serta melemahnya daya beli masyarakat. Dampak tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan finansial rumah tangga dalam memenuhi kewajiban ekonomi, salah satunya adalah pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan, khususnya kelompok peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Penelitian oleh Sari dkk. (2021) mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan rumah tangga dan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Peserta dengan pendapatan yang tidak menentu cenderung mengalami keterlambatan atau tunggakan pembayaran, terutama pada situasi ekonomi yang tidak stabil. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Lestari (2022) yang menyatakan bahwa penurunan pendapatan akibat tekanan ekonomi berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pembayaran iuran JKN.

Ditinjau dari aspek kemampuan membayar (*ability to pay*), Putri dkk. (2023) menyatakan bahwa perlambatan ekonomi memengaruhi pola alokasi pengeluaran rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan menjadi prioritas

utama dibandingkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Akibatnya, peserta sering kali menunda bahkan menghentikan pembayaran iuran dalam jangka waktu tertentu. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hidayat dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi rumah tangga meningkatkan risiko kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif.

Selain faktor kemampuan finansial, kemauan membayar (*willingness to pay*) peserta juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang dihadapi. Nurhayati dkk. (2021) menyatakan bahwa tekanan ekonomi membuat peserta menilai ulang keseimbangan antara manfaat yang diterima dari BPJS Kesehatan dan besarnya iuran yang harus dibayarkan. Ketika layanan kesehatan yang diperoleh dianggap tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, tingkat kepatuhan pembayaran iuran cenderung mengalami penurunan. Sejalan dengan hal tersebut, Kurniawan dan Astuti (2022) menemukan bahwa persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kondisi ekonomi dan kepatuhan dalam membayar iuran.

Dampak perlambatan ekonomi terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan semakin terlihat pada periode krisis, seperti saat pandemi COVID-19. Susanto dkk. (2020) menemukan adanya peningkatan signifikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan selama masa krisis ekonomi, terutama pada kelompok pekerja di sektor informal. Fenomena ini mencerminkan rendahnya ketahanan finansial peserta mandiri dalam menghadapi guncangan ekonomi. Temuan serupa disampaikan oleh Fauziah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi pascapandemi masih berdampak terhadap stabilitas pembayaran iuran JKN dalam beberapa tahun berikutnya.

Dari sisi kebijakan, sejumlah penelitian menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program JKN di tengah kondisi perlambatan ekonomi. Pratama dkk. (2023) menyoroti perlunya kebijakan subsidi iuran serta peningkatan edukasi finansial bagi peserta mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran. Sementara itu, Amalia dan Yusuf (2021) mengemukakan bahwa penerapan mekanisme pembayaran iuran yang lebih fleksibel dapat menjadi alternatif solusi dalam menekan angka tunggakan pada masa ketidakstabilan ekonomi.

Berdasarkan temuan berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlambatan ekonomi nasional berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Penurunan pendapatan masyarakat, pergeseran prioritas pengeluaran rumah tangga, persepsi peserta terhadap manfaat dan mutu layanan kesehatan, serta keterbatasan kebijakan yang responsif menjadi faktor-faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pembayaran iuran. Oleh sebab itu, kajian berbasis *literature review* ini memiliki peran penting untuk mengkaji secara menyeluruh dampak perlambatan ekonomi nasional terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, sehingga dapat menjadi landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi keberlanjutan Program JKN.

Sejumlah studi terdahulu juga mengungkapkan adanya hubungan yang kuat antara kondisi ekonomi nasional dan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, terutama pada kelompok peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU). Perlambatan ekonomi berpotensi mengganggu stabilitas pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan serta kemauan

peserta dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dampak tersebut tidak hanya tercermin pada tingkat kepatuhan individu, tetapi juga berimplikasi terhadap keberlanjutan pendanaan dan pelaksanaan Program JKN secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif melalui pendekatan telaah literatur untuk memahami keterkaitan antara perlambatan ekonomi nasional dan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis pengaruh perlambatan ekonomi nasional terhadap tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, khususnya pada peserta mandiri atau PBPU, dengan menggunakan metode *literature review*. Fokus penelitian mencakup identifikasi peran faktor ekonomi, seperti tingkat pendapatan, kemampuan membayar (*ability to pay*), dan kemauan membayar (*willingness to pay*), serta faktor non-ekonomi, antara lain pemahaman peserta mengenai manfaat Program JKN, persepsi terhadap kualitas pelayanan kesehatan, dan kebijakan iuran, dalam memengaruhi kepatuhan pembayaran iuran. Melalui sintesis hasil penelitian terdahulu, studi ini diharapkan mampu menjelaskan mekanisme hubungan antara perlambatan ekonomi dan kepatuhan pembayaran iuran, serta merumuskan implikasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan Program JKN di tengah dinamika ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana perlambatan ekonomi nasional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, penelitian ini menelaah pengaruh kondisi ekonomi yang melambat terhadap kemampuan peserta BPJS Kesehatan mandiri dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Permasalahan lain yang dikaji adalah bagaimana perlambatan ekonomi tersebut memengaruhi kemauan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS Kesehatan secara rutin.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perlambatan Ekonomi Nasional**

Perlambatan ekonomi nasional merupakan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami penurunan yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya tingkat pengangguran, serta melemahnya daya beli (Susanto et al., 2020). Di Indonesia, kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor informal, yang sebagian besar menjadi basis peserta BPJS Kesehatan mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Ketidakstabilan pendapatan yang dialami kelompok ini menyebabkan banyak rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran kesehatan secara konsisten (Fauziah et al., 2024).

### **BPJS Kesehatan dan Kepatuhan Pembayaran Iuran**

Kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat diartikan sebagai perilaku peserta dalam melaksanakan kewajiban membayar iuran secara rutin, tepat waktu, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sari et al., 2021). Tingkat kepatuhan ini memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rahmawati dan Lestari (2022) mengungkapkan bahwa kepatuhan pembayaran iuran pada peserta mandiri cenderung lebih rendah dibandingkan peserta penerima upah, terutama karena ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak tetap.

### **Kemampuan Membayar (*Ability to Pay*)**

Kemampuan membayar (*ability to pay*) mencerminkan kondisi ekonomi individu atau rumah tangga dalam memenuhi kewajiban finansial tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar (Putri et al., 2023). Dalam kondisi perlambatan ekonomi, kapasitas peserta dalam membayar iuran BPJS Kesehatan cenderung mengalami penurunan akibat adanya pergeseran prioritas pengeluaran rumah tangga. Hidayat et al. (2020) menemukan bahwa peserta dengan pendapatan rendah dan tidak menentu memiliki kemungkinan lebih besar mengalami tunggakan iuran dibandingkan dengan peserta yang memiliki pendapatan tetap.

### **Kemauan Membayar (*Willingness to Pay*)**

Kemauan membayar (*willingness to pay*) menggambarkan kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran yang dipengaruhi oleh penilaian terhadap manfaat dan mutu layanan kesehatan yang diperoleh (Nurhayati et al., 2021). Memburuknya kondisi ekonomi dapat mengubah persepsi peserta terhadap nilai manfaat BPJS Kesehatan, sehingga berdampak pada penurunan kemauan untuk membayar iuran. Kurniawan dan Astuti (2022) menjelaskan bahwa persepsi yang kurang baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan dapat memperkuat pengaruh tekanan ekonomi terhadap terjadinya ketidakpatuhan pembayaran iuran.

### **Hubungan Perlambatan Ekonomi dan Kepatuhan Pembayaran Iuran**

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi memiliki keterkaitan tidak langsung dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, yang dimediasi oleh faktor pendapatan, kemampuan membayar, dan kemauan membayar (Pratama et al., 2023). Perlambatan ekonomi berperan dalam menurunkan pendapatan rumah tangga, yang selanjutnya memengaruhi kemampuan serta kemauan peserta untuk membayar iuran dan meningkatkan risiko terjadinya tunggakan. Amalia dan Yusuf (2021) menegaskan bahwa apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang adaptif, pelemahan kondisi ekonomi dapat mengancam keberlanjutan pelaksanaan Program JKN.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* atau tinjauan pustaka untuk mengkaji dan mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas dampak perlambatan ekonomi nasional terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Pemilihan metode *literature review* didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara kondisi ekonomi makro, kemampuan dan kemauan membayar, serta tingkat kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan temuan empiris yang telah dipublikasikan.

Data penelitian bersumber dari artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu periode 2019–2025. Artikel diperoleh melalui berbagai basis data jurnal daring, antara lain *Google Scholar*, *Portal Garuda*, *ResearchGate*, serta *Open Journal System* (OJS) dari sejumlah penerbit jurnal nasional. Adapun kriteria inklusi dalam pemilihan artikel meliputi: (1) artikel yang membahas kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan atau JKN, (2) artikel yang mengkaji aspek ekonomi seperti pendapatan, kemampuan membayar (*ability to pay*), kemauan membayar (*willingness to pay*), atau dampak perlambatan ekonomi, (3) artikel tersedia dalam bentuk full text dan dapat diakses secara daring, serta (4) artikel menggunakan metode penelitian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian atau tidak tersedia dalam teks lengkap dikeluarkan dari proses analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah menggunakan kata kunci seperti perlambatan ekonomi, kepatuhan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan, JKN, *ability to pay*, dan *willingness to pay*. Artikel yang ditemukan selanjutnya disaring berdasarkan relevansi judul, abstrak, serta substansi isi terhadap tujuan penelitian. Dari tahapan seleksi tersebut, terpilih 15 artikel ilmiah yang kemudian dianalisis secara komprehensif sebagai rujukan utama dalam kajian pustaka.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) secara naratif, dengan mengelompokkan hasil-hasil penelitian berdasarkan tema utama, seperti dampak perlambatan ekonomi terhadap pendapatan, kemampuan membayar iuran, kemauan membayar, serta implikasinya terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Selanjutnya, temuan antar penelitian dibandingkan dan disintesis untuk mengidentifikasi pola hubungan, kesamaan, maupun perbedaan hasil penelitian. Proses sintesis ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual serta mendukung perumusan hipotesis penelitian yang didasarkan pada bukti empiris dari studi-studi terdahulu.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas hasil kajian, seluruh artikel yang dianalisis dipastikan berasal dari jurnal ilmiah dengan identitas penerbit yang jelas serta telah melalui proses *peer review*. Selain itu, penggunaan sumber pustaka yang beragam dan relevan diharapkan dapat mengurangi potensi bias serta meningkatkan ketepatan dalam interpretasi hasil kajian. Hasil akhir penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis dan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi akademik maupun kebijakan terkait upaya peningkatan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi perlambatan ekonomi nasional.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi nasional memberikan dampak yang bersifat struktural terhadap tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, terutama pada kelompok peserta mandiri (PBPU) yang sangat bergantung pada kestabilan pendapatan. Sebagian besar jurnal yang ditelaah mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi makro berfungsi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban

pembayaran iuran JKN.

Penelitian Susanto dkk. (2020) mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi, khususnya pada periode krisis, meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga yang kemudian berdampak pada menurunnya kemampuan peserta untuk membayar iuran secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari dkk. (2021) yang menyatakan bahwa peserta BPJS Kesehatan dengan pendapatan tidak tetap memiliki kecenderungan lebih besar mengalami tunggakan iuran dibandingkan peserta dengan pendapatan yang stabil. Hal tersebut menegaskan bahwa kestabilan pendapatan merupakan elemen penting dalam menjaga kepatuhan pembayaran iuran.

Lebih lanjut, kajian literatur menunjukkan bahwa penurunan pendapatan akibat perlambatan ekonomi tidak hanya memengaruhi kapasitas finansial rumah tangga, tetapi juga mendorong perubahan dalam skala prioritas pengeluaran. Putri dkk. (2023) menjelaskan bahwa pada kondisi ekonomi yang melemah, rumah tangga cenderung memfokuskan pengeluaran pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan pendidikan, sementara pembayaran iuran BPJS Kesehatan menjadi prioritas berikutnya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hidayat dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa semakin rendah kemampuan membayar (*ability to pay*), semakin besar risiko terjadinya tunggakan iuran hingga menyebabkan status kepesertaan menjadi tidak aktif.

Selain faktor kemampuan membayar, aspek kemauan membayar (*willingness to pay*) juga berperan signifikan dalam menentukan tingkat kepatuhan pembayaran iuran. Nurhayati dkk. (2021) menyatakan bahwa tekanan ekonomi mendorong peserta untuk menilai kembali manfaat yang diperoleh dari BPJS Kesehatan. Apabila manfaat layanan kesehatan tidak dirasakan secara optimal atau kualitas pelayanan dianggap kurang memadai, maka kesediaan peserta untuk membayar iuran cenderung menurun. Temuan ini diperkuat oleh Kurniawan dan Astuti (2022) yang menyebutkan bahwa persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan memperbesar pengaruh kondisi ekonomi terhadap ketidakpatuhan pembayaran iuran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara perlambatan ekonomi dan kepatuhan pembayaran iuran tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh variabel kemampuan dan kemauan membayar. Pratama dkk. (2023) menegaskan bahwa perlambatan ekonomi tidak semata-mata menyebabkan ketidakpatuhan, tetapi bekerja melalui mekanisme penurunan pendapatan, peningkatan beban pengeluaran rumah tangga, serta perubahan persepsi terhadap nilai manfaat layanan kesehatan. Dengan demikian, *ability to pay* dan *willingness to pay* berperan sebagai variabel perantara yang menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi makro memengaruhi perilaku pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya faktor kebijakan dan kelembagaan dalam memperkuat atau melemahkan dampak perlambatan ekonomi terhadap kepatuhan pembayaran iuran. Amalia dan Yusuf (2021) menyatakan bahwa kebijakan iuran yang bersifat seragam kurang mampu merespons fluktuasi pendapatan peserta mandiri, sehingga meningkatkan risiko tunggakan pada masa perlambatan ekonomi. Selain itu, Fauziah dkk. (2024) menekankan bahwa keterbatasan mekanisme perlindungan sosial bagi peserta mandiri turut memperburuk dampak tekanan ekonomi terhadap keberlanjutan kepesertaan JKN.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa ketidakpatuhan pembayaran iuran tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kesadaran peserta terhadap pentingnya jaminan kesehatan. Rahmawati dan Lestari (2022) menjelaskan bahwa sebagian besar peserta yang mengalami tunggakan tetap memahami urgensi perlindungan kesehatan, namun menghadapi keterbatasan ekonomi yang menghambat kemampuan mereka untuk membayar iuran secara rutin. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sanksi semata kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran di tengah kondisi perlambatan ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa perlambatan ekonomi nasional berdampak signifikan terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui interaksi yang kompleks antara kondisi ekonomi rumah tangga, kemampuan dan kemauan membayar, serta kebijakan pembiayaan JKN. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberlanjutan program JKN tidak hanya bergantung pada tingkat kepatuhan individu, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap dinamika ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel, berbasis pada kondisi ekonomi peserta, serta penguatan edukasi dan perlindungan sosial guna menjaga stabilitas pembiayaan BPJS Kesehatan di tengah perlambatan ekonomi yang berkelanjutan.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap 15 artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan, khususnya peserta non-PBI atau pekerja bukan penerima upah (PBPU), merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan faktor ekonomi sebagai determinan utama. Literatur yang dianalisis secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, stabilitas ekonomi rumah tangga, serta kemampuan membayar memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Hasil *literature review* juga menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi nasional berperan sebagai faktor struktural yang memperburuk tingkat kepatuhan pembayaran iuran. Kondisi perlambatan ekonomi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya ketidakpastian pendapatan, serta perubahan prioritas pengeluaran rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan tidak menjadi prioritas utama bagi sebagian peserta mandiri. Dampak ini paling dirasakan oleh kelompok pekerja sektor informal yang tidak memiliki pendapatan tetap dan tidak memperoleh subsidi iuran dari pemerintah.

Selain itu, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pemahaman atau sikap negatif peserta terhadap program JKN, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang hanya menitikberatkan pada upaya edukasi peserta dipandang belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran, terutama dalam konteks perlambatan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian berbasis *literature review* ini mendukung hipotesis bahwa perlambatan ekonomi nasional berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan melalui mekanisme penurunan kemampuan membayar. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional sangat bergantung pada kondisi ekonomi makro serta kebijakan pembiayaan kesehatan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Yusuf, M. (2021). Analisis kebijakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional terhadap kepatuhan peserta mandiri. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(2), 134–145.
- Fauziah, N., Rahman, A., & Lestari, D. (2024). Dampak kondisi ekonomi pascapandemi terhadap kepatuhan pembayaran iuran JKN peserta mandiri. *Indonesian Journal of Health Science*, 8(1), 22–31.
- Hidayat, A., Putra, R. E., & Salsabila, N. (2020). Ability to pay dan kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 4(2), 89–98.
- Kurniawan, D., & Astuti, S. (2022). Persepsi kualitas layanan dan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri. *Journal of Public Health Innovation*, 6(1), 55–64.
- Nurhayati, E., Maulana, I., & Prasetyo, B. (2021). Willingness to pay dan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta PBP. *Window of Public Health Journal*, 2(3), 201–210.
- Pratama, R. A., Widodo, S., & Handayani, L. (2023). Determinan ekonomi dan kepatuhan pembayaran iuran JKN: Peran ability to pay dan willingness to pay. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 112–123.
- Putri, A. D., Saputra, H., & Ningsih, T. R. (2023). Analisis kemampuan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di wilayah perkotaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 18(1), 45–54.
- Rahmawati, I., & Lestari, W. (2022). Faktor pendapatan dan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri. *Journal of Baja Health Science*, 4(2), 78–87.
- Sari, M., Anwar, R., & Fitriani, Y. (2021). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri. *Window of Public Health Journal*, 2(1), 15–25.
- Susanto, H., Kurniadi, A., & Wahyuni, S. (2020). Dampak krisis ekonomi terhadap kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(3), 141–150.